

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Keadaan Organisasi wanita pada masa Orde Baru diawasi dan ditata oleh pemerintah Orde Baru. Segala kegiatan yang dilakukan oleh organisasi wanita diawasi pemerintah Orde Baru. Organisasi wanita yang berkembang masa Orde Baru memiliki corak yang berbeda dari masa sebelumnya. Pada masa Orde Baru organisasi wanita memiliki corak yang beraneka ragam, tetapi keaneka ragaman organisasi wanita ketika masa ini mengalami kemunduran bagi pergerakan wanita. Kaum wanita ketika masa Orde Baru tidak lagi memperjuangkan nasib kaum wanita yang tertindas, organisasi wanita hanya bersifat perkumpulan para istri.

Pemerintah Orde Baru juga menetapkan dalam GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) tentang peranan kaum wanita dalam pembangunan. Pada bulan Maret tahun 1978 wakil-wakil rakyat yang berada di gedung DPR dan MPR menetapkan, bahwa kaum wanita diikutsertakan dalam pelaksanaan pembangunan. Ditetapkannya kaum wanita di dalam GBHN membuktikan bahwa pemerintah Orde Baru begitu memberikan perhatian yang khusus bagi peranan kaum wanita dalam pelaksanaan pembangunan. Pemerintah Orde Baru tidak hanya menetapkan peranan kaum wanita di dalam GBHN, tetapi pemerintah Orde Baru menetapkan dalam kebijakan publik.

Kaum wanita ketika masa Orde Baru diwajibkan untuk masuk menjadi salah satu anggota organisasi istri. Para istri yang suaminya bekerja sebagai pegawai negeri atau karyawan departemen negara

diwajibkan untuk berpartisipasi menjadi anggota organisasi Dharma Wanita. Bagi istri-istri profesional mereka memasuki organisasi istri yang menaungi profesi suaminya seperti, istri dari dokter masuk menjadi anggota organisasi Persatuan Istri Dokter Indonesia.

Organisasi Dharma Wanita merupakan wadah bagi kaum istri yang suaminya bekerja sebagai pegawai atau karyawan instansi atau departemen pemerintahan Republik Indonesia. Organisasi Dharma wanita merupakan organisasi wanita yang berfungsi sebagai pendukung dan pendamping suami mereka yang bekerja menjalankan tugas sebagai pegawai Republik Indonesia. Pembentukan organisasi Dharma Wanita bertujuan untuk mengumpulkan para istri pegawai agar lebih terarah dalam melakukan pendampingan terhadap suami.

Kota Banjar merupakan salah satu daerah yang berada di Provinsi Jawa Barat dan menjadi pintu gerbang masuk Provinsi Jawa Barat karena menghubungkan Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2003 Kota Banjar resmi mendirikan daerah otonom sendiri dan lepas dari pemerintahan Kabupaten Ciamis. Kota Banjar sejak resmi melepaskan diri dari pemerintahan Kabupaten Ciamis, maka secara otomatis organisasi Dharma Wanita ikut terpisah. Sebelum pembentukan daerah otonom di Kota Banjar, organisasi Dharma Wanita menginduk dan mempertanggung jawabkan segala kegiatan yang dilakukan oleh organisasi Dharma Wanita di Kota Banjar. Organisasi Dharma Wanita dibentuk di Kota Banjar pada masa transisi pemerintahan dari kotif menjadi pemerintahan kota. Pada

masa transisi di Kota Banjar pemerintah kotif saat itu mulai mengaktifkan organisasi Dharma Wanita dan meresmikan ketua organisasi Dharma Wanita yang pertama di Kota Banjar yaitu Tuti Memet Slamet. Organisasi Dharma Wanita ketika Kota Banjar berstatus masih kotif organisasi ini sempat vakum karena para pejabat pemerintahan Kotif Banjar ditarik ke pemerintahan Kabupaten Ciamis. Penarikan para pejabat daerah ini membuat kekosongan struktur organisasi Dharma Wanita di Kotif Banjar.

Organisasi Dharma Wanita di Kota Banjar mempunyai peranan di dalam proses peningkatan status dan pembentukan daerah otonom di Kota Banjar. Para istri organisasi Dharma Wanita mendukung perjuangan yang dilakukan oleh para suami mereka yang menjabat sebagai para staf pemerintahan, pejabat, dan anggota PNS dalam proses peningkatan Kotif Banjar menjadi pemerintahan Kota Banjar. Para anggota Organisasi Dharma Wanita tidak hanya melakukan dukungan, tetapi ikut terjun ke masyarakat dengan melakukan sosialisasi mengenai pembentukan pemerintahan Kota Banjar. Sosialisasi yang dilakukan organisasi Dharma Wanita agar masyarakat ikut mendukung dalam proses pembentukan pemerintahan Kota Banjar.

Pada masa sesudah peningkatan status dan pembentukan daerah otonom Kota Banjar organisasi Dharma Wanita berperan dalam mensukseskan program-program pemerintahan Kota Banjar. Organisasi Dharma Wanita didalamnya mempunyai sebuah program kerja dalam bidang pendidikan, ekonomi dan sosial budaya. Program kerja organisasi

Dharma Wanita mempunyai peran terhadap bidang pendidikan, ekonomi dan sosial budaya di Kota Banjar.

Pengaruh Organisasi Dharma Wanita dalam bidang pendidikan yaitu meningkatkan pendidikan di Kota Banjar dari pendidikan usia dini sampai dengan perguruan tinggi bagi masyarakat Kota Banjar khususnya bagi kaum wanita. Pengaruh organisasi Dharma Wanita dalam bidang kesehatan di Kota Banjar yaitu meningkatkan kualitas kesehatan dengan menjaga kebersihan lingkungan sekitar bagi masyarakat Kota Banjar khususnya bagi kaum wanita. Pengaruh organisasi Dharma Wanita dalam bidang ekonomi di Kota Banjar yaitu meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian dan pembangunan ekonomi di Kota Banjar. Pengaruh organisasi Dharma Wanita dalam bidang sosial adalah penghapusan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi di Kota Banjar. Korban tindak kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak kaum wanita.